

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gorontalo pada awal terbentuknya hanya terdiri dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah 12.215,44 km terdiri dari lima wilayah kabupaten yaitu kabupaten Boalemo, kabupaten Gorontalo, kabupaten Pohuwato, kabupaten Bone Bolango, kabupaten Gorontalo Utara, dan satu wilayah kota Gorontalo. Dari seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo wilayah kabupaten Pohuwato adalah terluas dengan 34,75 persen dari keseluruhan luas wilayah provinsi Gorontalo, dan kota Gorontalo adalah yang terkecil dengan hanya 0,53 persen dari total luas wilayah provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik {BPS} menyelenggarakan sensus penduduk (SP2010) yang menghasilkan angka pertama sementara jumlah penduduk provinsi Gorontalo sebanyak 1.038.585 jiwa atau 0,43 persen dari total penduduk Indonesia. Persebaran penduduk di provinsi Gorontalo tidaklah merata untuk semua wilayah kabupaten/kota. 34,17 persen atau 354.857 jiwa total penduduk provinsi Gorontalo terkonsentrasi di wilayah kabupaten Gorontalo dan kabupaten Gorontalo Utara menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 108.068 atau 10,02 persen.

Pada tahun 2010 mencatat bahwa provinsi Gorontalo tersebut terdiri dari 520.885 orang atau 50,15 persen penduduk laki-laki, dan 517.700 orang atau 49,85 persen penduduk perempuan. Sex ratio (rasio jenis kelamin) provinsi Gorontalo adalah 101 yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki dari pada

penduduk perempuan dengan perbandingan 101 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan. Hal tersebut berlaku juga hamper pada seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi gorontalo kecuali kota untuk gorontalo yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan dengan perbandingan 96 penduduk laki-laki perbandingan dengan 100 penduduk perempuan (BKKBN, 2011:9).

Dengan luas wilayah lebih dari 12 ribu km dan jumlah penduduk 1.038.585 jiwa, kepadatan penduduk di provinsi gorontalo adalah 85 jiwa/km. Wilayah dengan kepadatan terendah adalah kabupaten pohuwato yaitu 30 jiwa/km. Sedangkan kota gorontalo dengan luas wilayah 64,79 km merupakan wilayah terdapat diantara kabupaten/kota yang ada dengan kepadatan mencapai 2.778 jiwa/km jauh lebih tinggi dibandingkan hasil SP2000 yang mencatat tingkat kepadatan 2.083 jiwa/km atau terjadi kenaikan sejumlah 695 jiwa setiap km.

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk di provinsi gorontalo sementara adalah 1.038.585 jiwa. Ditinjau dari penyebaran, kabupaten gorontalo adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sejumlah 354.857 jiwa atau 34.17 persen dari total penduduk provinsi. Sedangkan wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah kabupaten gorontalo utara, dengan jumlah penduduk 104.068 jiwa atau 10.02 persen dari total penduduk provinsi.

Kemiskinan merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan suatu wilayah karena kemiskinan identik dengan ketidakmampuan suatu wilayah untuk melaksanakan aktivitas perekonomian maupun pembangunan dalam

mengangkat ketertinggalan wilayah tersebut. Masalah kemiskinan di suatu wilayah akan menjadi hambatan utama dalam pembangunan jika tidak segera diprioritaskan penanggulangannya. Sesuai dengan data yang telah diolah dari Kecamatan-Kecamatan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo sampai dengan Desember 2010 masih sekitar 21,11% atau 24.333 KK.

Ada banyak pemahaman tentang kemiskinan. Dari segi kemiskinan absolut, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar secara layak serta kegagalan untuk mencapai tingkat kelayakan minimum. Pemahaman ini berhubungan dengan kemiskinan material. Padahal bila kita membicarakan tentang kemiskinan, ia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material dasar saja, tetapi juga berhubungan dengan berbagai dimensi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, budaya, jaminan masa depan dan peranan sosial.

Paling sedikit ada tiga pendekatan untuk melihat sumber kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. *Pertama*, Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, KKN, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. *Kedua*, Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya (termasuk kepercayaan/ agama), seperti malas, tidak disiplin, boros, judi, banyak anak, poligami, tertutup dan statis, masih bertumpu pada kehidupan komunal, serta ketergantungan pada lingkungan alam. *Ketiga*, Kemiskinan Natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor alamiah atau natural seperti cacat tubuh, sakit, lanjut usia, lahan kritis dan tidak subur, banjir, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran hutan, dan lain-lain (Amiruddin, Mariana. 2008:56).

Secara umum, penyebab kemiskinan mencakup ketiga faktor di atas, yaitu disebabkan oleh faktor kultural, struktural, dan faktor natural. Salah satu penyebab kemiskinan kultural, , adalah besarnya jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan keluarga. Faktor ini berhubungan dengan tradisi dalam masyarakat kita yang masih membudayakan prinsip: "Banyak Anak Banyak Rejeki." Perinsip seperti ini mungkin ada benarnya pada saat jumlah penduduk kita masih sedikit dan memerlukan banyak tenaga kerja di sektor ekonomi subsisten. Memang dulunya, anak-anak adalah aset ekonomi dan tenaga kerja bagi orangtua yang masih menggantungkan hidupnya pada ekonomi subsisten. Namun untuk saat ini dan seterusnya prinsip: "Banyak Anak Banyak Rejeki" tersebut sudah kurang relevan dengan perkembangan jaman karena jumlah penduduk terus meningkat sementara sumber lapangan pekerjaan pun semakin menipis/terbatas.

Berbicara masalah kemiskinan sudah tentu akan menyinggung masalah kependudukan terutama di negeri kita yang tercinta Indonesia, dewasa ini diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia sekitar 248 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu sekitar 1,49% per tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk seperti ini penduduk setiap tahun akan bertambah sekitar 4 juta jiwa, yang setara dengan jumlah penduduk Singapura. Oleh pemerintah dasar penanganan masalah kependudukan telah diatur dalam Undang-

Undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang mengamanatkan bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang berhubungan pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera namun juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan. Hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mengemban mandat melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB nasional, yang dalam tugasnya BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar. Prosedur dan kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Kesepakatan global yang di deklarasikan di PBB (New York) pada tahun 2000 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah meratifikasi tujuan pembangunan pada millenium bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya dipahami secara sempit dalam arti sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, namun sasarannya sudah lebih luas lagi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, baik dari segi fisik maupun non fisik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan kependudukan saat ini merupakan bagian integral dan kebijakan pembangunan secara keseluruhan yang harus diletakkan dalam rangka kebijakan kependudukan jangka panjang. Millenium Development Goals mencakup delapan tujuan pokok, yaitu :1) Penghapusan kemiskinan dan

kelaparan; 2) Pendidikan dasar yang universal; 3) Promosi keadilan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Penurunan angka kematian anak; 5) Peningkatan kesehatan ibu; 6) Penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain; 7) Pelestarian lingkungan hidup, dan; 8) Kemitraan global untuk pembangunan. Dari kedelapan tujuan pokok itu telah mengindikasikan bahwa sebagian besar dari MDGs tersebut sangat berkaitan dengan penanggulangan masalah-masalah kependudukan termasuk didalamnya Keluarga Berencana.

Dari sisi mobilitas penduduk, menyangkut masalah persebaran penduduk. Penduduk Indonesia persebarannya sangat tidak merata. Hampir sekitar 58% penduduk tinggal di pulau Jawa yang luas areanya hanya 7% dari luas Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (environment stress) seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang, masalah air bersih (water management), sampah, terumbu karang, pendangkalan sungai serta polusi udara yang parah (Nurul, HA. 2008:77).

Dalam penelitian Sussetiawan (2009:123), pengangguran merupakan masalah yang mendapat perhatian karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dan masalah sosial. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga semakin tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar, di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan

keluaran (output) yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Apabila penyediaan lapangan kerja tidak dapat memenuhi pertumbuhan angkatan kerja maka sudah pasti akan banyak terjadi pengangguran. Dampak dari adanya pengangguran adalah adanya output loss yang hilang karena tidak bekerjanya para penganggur, dan semakin tingginya beban mereka yang bekerja menanggung hidup para penganggur ini, hal ini dikaitkan dengan rasio pengangguran. Di samping itu, pengangguran juga akan menimbulkan biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya pribadi dapat berbentuk hilangnya rasa percaya diri para penganggur karena tidak mampu menghasilkan pendapatan dan biaya sosial dapat berbentuk angka kriminalitas yang dikaitkan dengan adanya pengangguran. (BPS, Agustus 2010)

Angka ini masih terbilang cukup besar yang mesti kita kerjakan secara serius, sistematis dan konsisten. Pekerjaan mengatasi kemiskinan sesungguhnya bukan saja kebijakan daerah tetapi juga telah menjadi kebijakan nasional bahkan kesepakatan forum internasional seperti tertuang dalam butir pertama Millenium Development Goals (MDGs) yang berbunyi ; ‘menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Dampak dari kemiskinan di atas, munculnya permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan (Iskandar,2001:x)

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta percepatan pembangunan pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan

orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Depsos RI, 2009:17).

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam salah satu programnya terus berusaha menekan angka kemiskinan, termasuk di dalamnya mengurangi pengangguran di rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut setidaknya ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan yaitu kapasitas manajemen pemerintah daerah, alokasi *resources* yang efektif dan efisien, dan output yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan (Mahendra, 2009:12).

Perempuan bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga yang seringkali tidak dianggap produktif. Perempuan di keluarga miskin umumnya justru berperan produktif dalam menyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai pekerjaan misalnya menjadi buruh tani upahan. Peran perempuan dalam menyumbang ekonomi keluarga tidak dapat dianggap ringan karena di beberapa wilayah perempuan merupakan kontributor utama bagi ekonomi baik melalui pekerjaan yang dilakukan di bidang pertanian yang diupah maupun melalui pekerjaan tradisional yang bermanfaat dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

Hampir 65 % dari perempuan mengakui bahwa merekalah yang paling banyak bekerja di sawah dan ladang. Ketika suami bekerja mengambil hasil hutan dan meninggalkan lahan pertanian, saat itulah perempuan secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar rumah (BKKBN, 2011: 16). Penelitian ini memiliki fokus pada peran persatuan

istri-istri anggota dewan dalam pemberdayaan keluarga miskin di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini dengan bagaimana peran persatuan istri-istri anggota dewan dalam pemberdayaan wanita keluarga miskin di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran persatuan istri-istri anggota dewan dalam pemberdayaan wanita keluarga miskin di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penelitian terapan, terutama dalam kaitannya dengan peran perempuan dalam penurunan indeks kemiskinan.
2. Secara praktis. Memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah sebagai bahan atau landasan untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan, khususnya dalam keterlibatan perempuan dalam penurunan kemiskinan.